

## **Pemilu 2024 menimbulkan kekhawatiran serius terhadap HAM di Indonesia dan kawasan, kata anggota parlemen Asia Tenggara**

JAKARTA - Perkembangan seputar pemilihan umum yang baru saja digelar di Indonesia berisiko besar bagi masa depan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi di negara tersebut, kata anggota parlemen Asia Tenggara hari ini.

*"Kami sangat prihatin dengan banyaknya laporan tentang penyalahgunaan kekuasaan, termasuk campur tangan terhadap Mahkamah Konstitusi serta penggunaan bantuan sosial untuk tujuan politik, yang telah secara serius merusak integritas pemungutan suara,"* kata Charles Santiago, Co-Chair ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) dan mantan anggota parlemen Malaysia.

Dari tanggal 12 sampai 14 Februari, APHR melakukan kunjungan studi untuk mengamati dan mempelajari proses pemilu di Indonesia. Selama kunjungan tersebut, delegasi APHR - yang terdiri dari anggota dan mantan anggota parlemen dari Malaysia, Timor-Leste, dan Thailand - bertemu dengan badan penyelenggara pemilu Indonesia serta perwakilan dari beberapa organisasi masyarakat sipil. Aktivis dan akademisi menyatakan keprihatinan mereka terhadap independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), netralitas lembaga negara, dan efektivitas sanksi pelanggaran pemilu, di antara masalah lainnya. Asian Network for Free Elections (ANFREL) turut menyoroiti temuan serupa dalam laporan sementara misi pengamatan pemilu mereka.

*"Meskipun kami menghargai bahwa KPU dan Bawaslu telah mengawasi hari pencoblosan yang secara umum berjalan damai dan lancar, pemilu dan demokrasi bukan hanya tentang satu hari di bilik suara. Kami mendesak rekan-rekan anggota parlemen di Indonesia untuk mempertimbangkan legislasi yang akan memperkuat independensi serta kekuatan penegakan KPU dan Bawaslu, untuk memastikan bahwa pemilu di masa depan berlangsung di medan perang yang benar-benar seimbang,"* kata anggota APHR dan anggota parlemen Malaysia Syed Ibrahim bin Syed Noh.

Pengamat dan pegiat pemilu dalam negeri juga melaporkan bahwa telah terjadi beberapa kegagalan selama proses pemungutan suara, serta dalam aplikasi penghitungan suara KPU, Sirekap.

*"Kami mendukung upaya masyarakat sipil Indonesia dalam mendokumentasikan dan melaporkan semua dugaan pelanggaran dan kesalahan pemilu, dan kami mendesak semua lembaga terkait untuk menanggapi laporan tersebut secara komprehensif dan tepat waktu untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemilu,"* kata anggota parlemen Thailand Chutiphong Pipoppinyo.



## ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

Meskipun hasil resmi baru akan diumumkan bulan depan, hasil awal menunjukkan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memenangkan pemilihan presiden. Prabowo, seorang mantan jenderal Angkatan Darat, diduga terlibat dalam beberapa pelanggaran HAM berat, termasuk pembunuhan warga sipil selama pendudukan Indonesia di Timor-Leste pada tahun 1980-an, serta penculikan aktivis pro-demokrasi menjelang akhir rezim mantan presiden Soeharto pada 1997-1998. Calon wakil presiden Prabowo, Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko "Jokowi" Widodo, baru bisa mencalonkan diri setelah keputusan kontroversial oleh Mahkamah Konstitusi, yang saat itu dipimpin oleh paman Gibran.

*“Fakta bahwa pemenang pemilihan presiden adalah terduga pelanggar HAM yang belum pernah diadili menjadi pertanda buruk bagi prospek perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum di Indonesia,”* kata Anggota APHR dan mantan anggota parlemen Timor-Leste, Abel Da Silva. *“Kami menyerukan kepada rekan-rekan anggota parlemen di Indonesia untuk bertindak sebagai penyeimbang yang kuat untuk memastikan bahwa kekuasaan eksekutif tidak dibiarkan melampaui batas.”*

*“Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia sering dijadikan tolak ukur oleh negara tetangganya, khususnya dalam masalah hak asasi manusia dan demokrasi,”* kata Anggota APHR dan anggota parlemen Timor-Leste, Lidia Norberta dos Santos Martins. *“Karena itu, kami berharap siapa pun yang memenangkan pemilu akan berkomitmen untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi Indonesia dan menjunjung tinggi hak asasi manusia rakyatnya.”*